

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*)”

Muhammad Ardhymas Lazuardi

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual seperti *Bitcoin*, merupakan salah satu modus operandi baru dalam hal pencucian uang, hal ini berkembang dikarenakan perkembangan teknologi dibidang perekonomian. Bank Indonesia menyatakan bahwa Mata uang virtual bukan suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia, akan tetapi Bank Indonesia tidak melarang eksistensi keberadaan mata uang virtual, bahkan terdapat beberapa marketplace dan perusahaan *Exchanger Bitcoin* di Indonesia, hal ini memicu kerentanan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual, karena dilihat dari karakteristiknya mata uang virtual dapat melakukan transaksi dengan nama palsu dan identitas palsu serta mata uang virtual tidak melibatkan pihak ketiga selaku lembaga *intermediate*, sehingga segala transaksi hanya diketahui oleh para pengguna mata uang virtual, penelitian ini menggunakan metode penelitian secara *Yuridis Normatif* dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa keuangan mata uang virtual dan pertanggungjawaban dari pemerintah Indonesia, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap kerentanan tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual di Indonesia.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Mata Uang Virtual (Bitcoin)

“RESPONSIBILITY OF MONEY LAUNDERING CRIME THROUGH VIRTUAL CURRENCY (BITCOIN)”

Muhammad Ardhyas Lazuardi

Abstract

The crime of money laundering through virtual currencies such as Bitcoin, is one of the new modus operandi in terms of money laundering, this is developing due to technological developments in the economy. Bank of Indonesia states that virtual currencies are not a legitimate payment instrument in Indonesia, but Bank of Indonesia does not prohibit the existence of virtual currencies, there are even a number of marketplaces and Bitcoin exchanger companies in Indonesia, this triggers the vulnerability of money laundering through virtual currency, because seen from the characteristics of virtual currencies can make transactions with fake names and fake identities and virtual currencies do not involve third parties as intermediate institutions, so that all transactions are only known by users of virtual currencies, this research uses research methods Juridically Normative and the purpose of this study is to find out how the form of responsibility of money laundering crimes committed through virtual currencies from the point of view of criminal liability of criminal offenders, the responsibility of the providers of currency financial services virt and the responsibility of the Indonesian government, and also to find out the factors that influence law enforcement against money laundering crimes committed through virtual currencies. It is hoped that this research can increase knowledge of the vulnerability of money laundering crimes through virtual currencies in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Responsibility, Money laundering, Virtual Currency (Bitcoin).